Bali Post

Pelimpahan 14 Tersangka Kasus SPPD Fiktif Ditunda

Bali Post/kmb35

Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumadana

Gianyar (Bali Post) -

Pelimpahan 14 tersangka kasus SPPD fiktif ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar ditunda. Hingga Senin (12/10) sore kemarin, belum diketahui apa penyebab ditundanya rencana pelimpahan tahap dua dari Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tersebut. Di samping itu diketahui kasus SPPD fiktif yang dilakukan 14 tersangka dari Dispenda Gianyar ini ternyata menghabiskan anggaran sekitar Rp 90 juta untuk pelesiran ke Thailand dan Singapura.

Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumadana yang ditemui di Kantor Kejari Gianyar mengatakan, hingga Senin sore kemarin, jajarannya belum menerima pelimpahan 14 tersangka SPPD fiktif sesuai yang direncanakan.

Pihaknya juga belum mengetahui penyebab dibatalkannya proses tahap dua pelimpahan kasus SPPD fiktif dari Polda Bali ke Kejati Bali.

Ia menambahkan, karena kasus ini ditangani Polda Bali, kejaksaan sifatnya hanya menunggu tahap dua tersebut. Sementara Kejari Gianyar kewenangannya hanya sebagai penunjukan jaksa penuntut umum Kejati Bali untuk menyelesaikan perkara yang objeknya di Kabupaten Gianyar.

Disinggung terkait tambahan 10 PNS yang diperkirakan menjadi tersangka dalam kasus ini, Ketut Sumadana kembali menegaskan bahwa berkas untuk tambahan 10 tersangka tersebut masih ditangani penyidik Polda Bali. Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gianyar, Herdian Rahadi membeberkan berdasarkan berkas pernyataan para tersangka, kasus SPPD fiktif yang memakan uang negara kurang lebih Rp 90 juta ini, terjadi pada Oktober 2012. Diketahui dalam perencanaan SPPD, belasan pegawai Dispenda Gianyar ini seharusnya menuju Jawa Barat yakni Garut dan Bandung. Namun realisasinya mereka malah pelesiran ke luar negeri yakni Thailand dan Singapura. **(kmb35)**

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2014

Hal : 8

Bali Post

Penuhi Kewajiban Konstitusional

RAPBD Badung Tahun 2016 Diserahkan ke Dewan

PENJABAT Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam melakukan pembahasan APBD secara tepat waktu. Sejak diserahkan Senin (12/10) kemarin, RAPBD Badung tahun 2016 telah direspons secara langsung oleh DPRD Badung dengan melakukan agenda pembahasan melalui rapat kerja dengan eksekutif.

"Melalui proses pembahasan RAPBD tahun 2016 secara lebih awal ini, maka tugas konstitusional bersama ini telah mulai berproses," ujar Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka usai menerima laporan Kepala Bappeda Litbang Wayan Suambara, Senin kemarin.

Menurutnya, pembahasan RAPBD yang tepat waktu menjadi penting dilakukan mengingat APBD 2016 merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik. Terutama, pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di berbagai bidang dan sektor. Ini sepenuhnya diorientasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Badung.

"Dengan diserahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 secara tepat waktu ini, maka kewajiban konstitusional bersama antara pemerintah dan Dewan akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan dan penajaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan *krama* Badung," terangnya.

Sementara itu, Suambara dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa RAPBD, sesuai arahan Penjabat Bupati, telah diserahkan secara tepat waktu kepada DPRD Badung. Komposisi RAPBD Badung tahun 2016 yakni kontribusi terhadap pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Capaian ini terdiri dari PAD sebesar Rp 2,9 triliun lebih, dana perimbangan Rp 314,7 miliar lebih, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 352 miliar lebih.

Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dirancang sebesar Rp 3,6 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Sedangkan komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat sebesar Rp 3,6 triliun lebih, di mana belanja publik sebesar 63,13 persen. **(ad756)**

Edisi : Selasa, 13 Oktober 2015

Hal : 2